

## STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA

**Penulis** : Wiryawan Kresna Wisnu Brata  
**Institusi** : Universitas Muhammadiyah Jakarta  
**Email Korespondensi** : wkhsajuang@gmail.com  
**DOI** : 10.53947/perspekt.v1i4.191

### Abstrak

**Kata Kunci:**  
 Komunikasi Politik  
 Pemerintah  
 Konflik Papua

Gagasan ini menggambarkan bagaimana peran strategi komunikasi politik pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua yang sudah terjadi begitu lama. Gagasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait penyelesaian konflik Papua. dalam gagasan ini pemerintah belum melihat persoalan-persoalan Papua secara utuh dan bahkan memaksakan tafsiran/simpulan berdasarkan analisisnya sendiri. Konsep Dialog Papua-Jakarta merupakan tawaran dari gagasan ini agar pemerintah dapat memotret Papua secara utuh sampai pada lapisan bawah, sehingga tidak ada satu pun aspek yang terlewat baik itu Sosial, Budaya, Ekonomi bahkan aspek Politik. Sehingga diharapkan ke depan Permasalahan-permasalahan Papua dapat terselesaikan dengan baik dan secara berkesinambungan.

### Abstract

**Keywords:**  
 Political  
 Communication  
 Government  
 Papuan Conflict

*This idea illustrates the role of the government's political communication strategy in resolving the Papuan conflict that has occurred for so long. This idea is expected to contribute ideas to the government in making policies related to the resolution of the Papuan conflict. In this idea, the government has not looked at the problems of Papua as a whole and has even forced interpretations/conclusions based on its own analysis. The concept of the Papua-Jakarta Dialogue is an offer of this idea so that the government can take a picture of Papua as a whole down to the lower layers, so that no aspect is overlooked, be it Social, Cultural, Economic and even Political aspects. So it is hoped that in the future Papua's problems can be resolved properly and sustainably.*

## 1. PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan komunikasi persuasi yang selalu dilakukan oleh politikus maupun partai politik untuk mencapai tujuan politiknya. Termasuk digunakan sebagai pendekatan oleh pemerintah dalam mempersuasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan di masyarakat.

Pace, Peterson dan Burnett (1979; dalam Venus, 2007, hlm. 30) mendefinisikan

persuasi sebagai tindakan komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikan mengadopsi pandangan komunikator mengenai suatu hal atau melakukan suatu tindakan tertentu. Persuasi politik sudah menjadi suatu keharusan dalam kehidupan politik. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi politik dalam sistim politik demokrasi. dimana lembaga-lembaga politik dan lembaga masyarakat melakukan artikulasi politik terhadap aspirasi masyarakat, dikomunikasikan dan diintegrasikan

dalam sistim politik menjadi suatu kebijakan politik Negara, karena lembaga-lembaga politik dibentuk untuk memberikan *input* dan penguatan bagi sistem politik, agar proses politik tersebut melahirkan berbagai produk politik seperti kebijakan publik, keputusan publik, dan regulasi yang berpihak pada kepentingan *Civil Society*.

Demikian pula dalam menyelesaikan kasus-kasus politik berupa konflik vertikal maupun horizontal, pemerintah Indonesia sering menggunakan pendekatan komunikasi politik dalam rangka mencari solusi dalam bentuk kebijakan politik agar tercipta suasana damai di masyarakat. Apalagi dalam menghadapi tekanan lembaga internasional dengan tuduhan pelanggaran HAM dan genosida yang sering dialamatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam setiap penanganan konflik di Papua.

Sejak era reformasi paradigma kenegaraan berubah dengan euforia demokrasi, sehingga pendekatan komunikasi politik pemerintah menjadi agak sulit dan terkesan tidak berdaya menghadapi tekanan internasional dan tuntutan Masyarakat Papua. Lemahnya komunikasi politik pemerintah dapat dilihat dari maraknya aksi penembakan liar, sehingga direspons oleh aparat TNI/Polri dengan pendekatan keamanan yang represif, disisi lain indikator lemahnya komunikasi politik, dapat dilihat dari semakin terkonsolidasinya gerakan kelompok-kelompok yang anti pemerintah untuk melakukan tekanan secara terbuka dengan tuntutan "merdeka", bahayanya gerakan ini sering meluas pada ranah konflik horizontal dengan permainan isu SARA, sehingga melahirkan sikap "inferioritas kompleks",

yaitu sikap kelompok-kelompok yang selama rezim Orde baru merasa terjajah, tertekan, tertindas, termarginalisasi dan teraniaya, mereka bangkit kembali melakukan penindasan dengan menghidupkan sentimen Papua Merdeka, mereka memproklamirkan diri dengan melakukan perlawanan terbuka, dengan pengibaran panji-panji Bintang Kejora dan meneriakkan yel-yel "Merdeka". Ibarat teori efek Domino, gerakan ini langsung disambut oleh kelompok-kelompok lain di Papua dengan menyuarakan hal yang sama. Berawal dari pembentukan "Aliansi Mahasiswa Papua di Makassar tahun 1999 oleh beberapa mahasiswa asli Papua yang kuliah di luar Papua di pimpin oleh Viktor Yeimo dkk., maka gerakan perlawanan ini mulai merambah wilayah pegunungan tengah, dan puncaknya tahun 2000 muncul kelompok yang mengatasnamakan "kelompok 100" bertemu Presiden Habibie dan secara terang-terangan meminta agar Papua Merdeka. Betapa kagetnya pemerintah dan Pihak keamanan menangani gerakan ini terutama pada masa awal reformasi, sehingga pendekatan keamanan atas nama kedaulatan negara pun digunakan, dan akibatnya terjadilah konflik Vertikal yang tidak dapat dihindari. Pada masa Presiden Gusdur, pemerintah mengambil kebijakan politik dengan merubah nama provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua dengan alasan budaya, yang bagi peneliti di sinilah letak kehebatan seorang Kyai Abdurrahman Wahid (Gusdur) dalam melakukan komunikasi politik dengan pendekatan budaya, dan pada tahun yang sama beliau memfasilitasi dana penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua I.

Sebenarnya itulah bagian dari langkah persuasi pemerintah dalam perspektif komunikasi politik yang sementara dimainkan presiden, walaupun pada akhirnya kebijakan Presiden Gusdur ini menuai kritikan oleh tokoh-tokoh politik nasional di Jakarta, sehingga muncullah isu pemakzulan (*inpeach*) terhadap Presiden Gusdur sampai beliau akhirnya lengser dari takhta empuk kepresidenan, namun rakyat Papua bangga dengan sikapnya sebagai seorang negarawan sejati.

Sejak tahun 2009 muncullah fenomena baru di masyarakat Papua, sebagai solusi penyelesaian konflik di Papua secara bermartabat, yaitu gagasan Dialog Jakarta-Papua yang di pelopori oleh Pater Dr. Neles Tebay dan Dr. Muridan S. Wijoyo (*alm*) seorang peneliti dari LIPI yang banyak mengabdikan dirinya untuk gerakan perdamaian di tanah Papua. Pertanyaan yang muncul dari pemerintah saat itu, mengapa harus dialog? Bukankah selama ini pemerintah sudah sering melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua? ternyata pertanyaan yang sama kembali muncul ketika Jokowi berkunjung ke Papua bulan Mei 2015, namun yang dibutuhkan orang Papua bukan dialog orang per orang, apalagi hasilnya sampai saat ini belum maksimal, belum ada langkah-langkah positif kearah penyelesaian konflik.

Selama ini banyak anggapan dari masyarakat Papua bahwa pemerintah dinilai sangat sepihak dalam memotret persoalan di Papua serta memberi tafsir/simpulan berdasarkan dengan analisisnya sendiri. Paradigma pemerintah dan TNI inilah yang selalu dipaksakan menjadi paradigma

masyarakat Papua, sehingga setiap masukan/informasi masyarakat diluar paradigmanya selalu ditolak dan malah dicurigai. Padahal masyarakat Papua sudah begitu kuat resistensi dan kecurigaannya terhadap produk kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan Otonomi khusus.

Menurut Simmel (dalam Susan, 2009, hlm. 42) “Ketika Konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik akan menciptakan batasan-batasan antar kelompok dengan memperkuat kesadaran internal yang membuat kelompok tersebut ter bedakan dan terpisah dari kelompok lain”

Dalam masa kepemimpinan Jokowi-JK ada fenomena politis yang kondusif, memberi angin segar bagi terciptanya suasana damai pada masyarakat Papua, hal ini terlihat pada saat kedatangan beliau ke Papua bulan Mei 2015 lalu, dalam kunjungan tersebut beliau mengambil kebijakan pemberian Grasi terhadap 5 (lima) Tapol/ Napol dan pemberian ijin kepada wartawan asing untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik di tanah Papua. Ini artinya ada strategi komunikasi politik yang perlu diamati, dikaji, dan dianalisa sebagai *role model* bagi seorang pemimpin bangsa ini ke depan. Sebagai seorang sipil ternyata Jokowi lebih berani mengambil langkah-langkah tidak populer demi menjawab aspirasi masyarakat. Gagasan ini dibuat nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengatasi konflik Papua melalui strategi komunikasi politik dan tentunya sebagai khazanah wawasan bagi pembaca lainnya.

## 2. PEMBAHASAN

### KONSEP DIALOG PAPUA-JAKARTA.

Dalam Ilmu komunikasi, peranan komunikasi efektif sangat penting untuk menghindari terjadinya *misskomunikasi*. Sedangkan *misskomunikasi* sendiri terjadi sebagai akibat dari komunikasi yang tidak efektif. Dalam interaksi komunikasi dengan masyarakat adat di Papua, kemungkinan terjadinya *misskomunikasi* tersebut tidak bisa dihindari akibat perbedaan cara pandang budaya dan adat istiadat. Apalagi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat rendah atau malah tidak pernah sekolah. Dari aspek interaksi dengan masyarakat Papua sebagai komunikan, *misskomunikasi* juga dapat dipicu oleh kondisi lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk (plural) secara budaya, agama, dan kelompok sosial. Dalam kehidupan politik sering dijumpai sekelompok orang, organisasi, dan juga kelompok politik yang bereaksi terhadap suatu keputusan atau kebijakan pemerintah dengan sikap tidak mengerti, tidak mau mengerti, sulit mengerti dan tidak bisa mengerti. Sikap demikian boleh jadi merupakan efek dari komunikasi pemerintah yang kurang efektif.

Menurut Almond dan Verba (1963, hlm. 152) bahwa “Komunikasi Politik merupakan fungsi sistem yang mendasar (*basic function of the system*) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik sebuah bangsa. siapa saja tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik, karena menyangkut perubahan dalam pola-

pola komunikasi, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat.

Pada masyarakat bangsa yang majemuk, peran komunikasi politik Pemerintah akan dihadang oleh berbagai persoalan sosial, yang lahir ditengah keberagaman masyarakat. Hal itu mengandung arti bahwa komunikasi politik pemerintah akan bermain pada kepentingan yang selalu berubah-ubah sesuai isu-isu dan letupan-letupan sosial yang masif terjadi di berbagai daerah seperti di Papua, sehingga tidak jarang isu-isu tersebut meluas menjadi konsumsi publik dan bahkan menjadi isu internasional, yang melemahkan posisi tawar pemerintah dalam kancah politik luar negeri. Dilihat dari rumusan diatas maka komunikasi menjadi penting terutama dalam menyelesaikan konflik politik yang bersifat vertikal di Papua, karena menyangkut suatu kebijakan dan sikap politik pemerintah yang mendasar dalam melihat fenomena konflik yang sudah terjadi begitu lama. dan sudah berdampak pada lumpuhnya pembangunan masyarakat.

Demikian halnya, koordinasi dan pengendalian individu dalam peran-peran organisasi yang berbeda memerlukan pengkomunikasian informasi dan penyebaran pesan. Jadi, dapat ditegaskan, suatu pola sosialisasi dalam membangun kekuatan organisasi membutuhkan perubahan dalam pendekatan komunikasi”, termasuk organisasi negara-bangsa. Perubahan menjadi suatu keniscayaan ketika kebuntuan suatu pendekatan selalu berulang-ulang sehingga menimbulkan sikap ketidakpastian dan kekecewaan. Bagaimana menyatukan pemahaman antara simbol-simbol budaya ini dengan pemerintah melalui komunikasi

politik yang intens dan bermartabat. Bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa kedamaian di tanah ini diatas segala-galanya. Dalam ilmu komunikasi, terjadinya interaksi komunikasi dua arah merupakan bagian dari efektivitas internalisasi isi pesan kepada komunikan, dan untuk merealisasikan itu, maka, pemerintah selaku pemegang otoritas negara perlu menghindari pola pemaksaan ide dan gagasan. memperlakukan orang Papua sebagai pemegang kedaulatan adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang harus dibina, dibangun, dan disejahterakan. Sehingga ketika terjadi umpan balik (*feedback*) dalam hal ini sikap masyarakat, sebagai interaksi komunikasi haruslah disikapi dengan bijak.

Dalam kaitannya dengan konflik Papua dan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dipandang perlu melakukan konsep Dialog Papua-Jakarta, dialog yang dimaksudkan disini adalah dialog secara utuh dengan melibatkan seluruh lapisan akar rumput sehingga pemerintah diharapkan dapat melihat atau memotret secara utuh apa sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Papua karena untuk memahami masalah dalam lingkungan sosial-budaya masyarakat bukanlah perkara yang mudah, karena sangat luas dan kompleks wilayah kajiannya. tapi walaupun demikian, yang menjadi penting dalam melakukan pendekatan adalah dengan selalu menggunakan perspektif Papua, seperti komunikasi politik dalam perspektif Papua. Kondisi inilah yang menurut kami menjadi salah satu titik lemah pendekatan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik yang

efektif pada masyarakat Papua. Selanjutnya adalah ketika pemerintah telah mampu melihat secara utuh dan menggunakan perspektif Papua baik itu secara sosial Ekonomi Budaya maupun secara Politik diharapkan akan melahirkan program kebijakan pembangunan yang tepat.

### 3. KESIMPULAN

Permasalahan konflik Papua harus segera diantisipasi atau paling tidak meminimalisir seminim mungkin demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep Dialog Papua-Jakarta adalah jalan yang paling memungkinkan karena dianggap dapat melihat atau memotret secara utuh apa sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Papua karena untuk memahami masalah dalam lingkungan sosial-budaya masyarakat bukanlah perkara yang mudah, karena sangat luas dan kompleks wilayah kajiannya. tapi walaupun demikian, yang menjadi penting dalam melakukan pendekatan adalah dengan selalu menggunakan perspektif Papua, seperti komunikasi politik dalam perspektif Papua. sehingga selaras dengan kebijakan pembangunan Papua yang akan diambil oleh pemerintah. Sehingga diharapkan kedepan Permasalahan-permasalahan Papua dapat terselesaikan dengan baik dan secara berkesinambungan.

### 4. REFERENSI

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Bhakti, I. N. (2005). Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua: Pilihan Antara Kemerdekaan dan Otonomi.

- Dalam D. F. Anwar (Ed.), *Konflik Kekerasan Internal* (hlm. 255–256). Obor.
- Cholil. (1971). *Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*. Puserjarah ABRI–Dephankam.
- Deplu RI. (1998). *Sejarah Kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia*. Deplu RI.
- Elisabeth, A., & Widjojo, M. S. (2004). *Pemetaan Peran dan Kepentingan Aktor dalam Konflik di Papua*. Lipi.
- Irian Barat dari Masa ke Masa, Sejarah Militer Kodam XVIII Tjendrawasih*. (1971). Puserjarah ABRI.
- Kambai, Y. (2003). *Gerakan Papua Merdeka di Bawah Bayang-Bayang Mega-Haz*. ELSHAM.
- Laporan Tim Pengkajian Komnas HAM tentang Permasalahan HAM di Papua (Wamena dan Wasior)*. (2003). Komnas HAM.
- Matulesy, A. (2003). *Gerakan Mahasiswa*. Wineka Media.
- Osborne, R. (2001). *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*. Elsam.
- Pace, R. W., Peterson, B. D., & Burnett, M. D. (1979). *Techniques for effective communication*. Addison-Wesley.
- Pawito. (2008). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Lkis Pelangi Aksara.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Tebay, N. K. (1999). *Orang Papua Menuju Kepunahan*. Kelompok Studi Gaise, Keuskupan Bandung dan Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung.
- Uchjana, O. (2001). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Venus, A. (2007). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Widjojo, M. S. (2005). Separatisme—Hak Asasi Manusia – Separatisme: Siklus Kekerasan di Papua, Indonesia. *Jurnal HakAsasi Manusia Dignitas*, III(1).